

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asyhandie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah)*. (Cetakan Kelimabelas, Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan.

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.

Menggala, Nata, Hasran Basri, dan Sarjita. 2005. *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.

Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prinst, Darwan. 1996. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinanta. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.

Syahrani, Riduan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Cytra Aditya Bakti.

Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

**Peraturan Perundang-undangan:**

HIR (Herziene Indonesisch Reglement).

RV (Reglement of de Rechtsvordering).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan, Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yk

**Internet:**

Andi Mekasari. *Skripsi Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Diterima (Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard) Dalam Perkara Perlawanan Eksekusi (Studi Kasus Putusan No.09/Pdt====Plw/2011/Pn.Sidrap.* Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2017 Pukul 16:00 Wib. Hal 3-4

Laura Youningsih. *Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Premature Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Gugatan Citizen Lawsuit Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu.* Fakultas Hukum UI. [Http://Lib.Ui.Ac.Id/File?File=Digital/123648-Pk%20iii%20642.8275Eksepsi%20terhadap-Ha.Pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648-Pk%20iii%20642.8275Eksepsi%20terhadap-Ha.Pdf). Hal 35. Diakses Pada Tanggal 18 April 2017 Pukul 11:00